

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada proses komunikasi dan pertukaran informasi. Kemajuan tersebut diiringi dengan pesatnya akses internet yang semakin memberikan kemudahan dalam hidup manusia di berbagai aspek. Berdasarkan literatur yang ada, sebelum TIK berkembang pesat proses komunikasi dan pertukaran informasi masih menggunakan media-media konvensional seperti surat kabar, telegraf, telepon kabel, dll. Pada perkembangannya, proses penyampaian pesan saat ini telah tersentuh oleh teknologi modern sehingga dengan mudah dapat menerima informasi dari berbagai sumber dari belahan dunia manapun. Fenomena munculnya alat komunikasi yang canggih seperti *smartphone* dan internet menjadi contoh nyata bahwa proses penyampaian pesan telah bertransformasi, dari media konvensional yang memiliki keterbatasan dalam pengiriman pesan dan jumlah audiens beralih pada pemanfaatan teknologi digital.

Meskipun kehadiran alat komunikasi modern dianggap dapat menjawab tantangan perkembangan dunia, tetapi tidak sepenuhnya praktik komunikasi modern berjalan baik. Ada beberapa resiko yang akan dihadapi seperti manusia menjadi terlalu bergantung pada gadget dan teknologi, pergeseran nilai-nilai kebudayaan di masyarakat, dan potensi adanya perang informasi karena derasnya arus informasi di media sosial. Fenomena tersebut menimbulkan tantangan tersendiri mengenai perdebatan kualitas dan kontrol informasi di ruang virtual yang selalu berkembang.

Tidak terkontrolnya perputaran informasi menimbulkan maraknya informasi maupun berita palsu atau bohong yang disebut Hoaks. Hoaks adalah informasi yang dibuat atau direkayasa untuk menyembunyikan informasi asli. Dengan kata lain, hoaks didefinisikan sebagai upaya untuk memalsukan fakta dengan menggunakan informasi yang tampaknya meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi (Diskominfo, 2022). Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoaks akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, perlu adanya program yang dijalankan pemerintah dalam meminimalisir berita hoaks. Kehadiran pemerintah bersama *stakeholders* dibutuhkan dalam upaya strategi pengawasan khusus tersebarnya hoaks. Selain itu juga diperlukan efektivitas dan kecepatan koordinasi antar lembaga pemerintah untuk mengklarifikasi isu.

Dewasa ini, media sosial mengalami pergeseran fungsi selain sebagai media komunikasi juga sebagai tempat pertemuan khalayak untuk bertukar berita, potongan-potongan informasi dan rekomendasi satu sama lain. Tersedianya tempat pertemuan dengan aktivitas konektif dengan kadar tinggi inilah yang membedakan media sosial dengan media konvensional lainnya (Dicjk, 2013). Media sosial populer seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Snapchat*, *Whatsapp*, dll adalah tempat dimana berita berjenis apapun baik *inforntainment*, *breaking news*, dan informasi trending yang sedang ramai dibicarakan khalayak cepat menyebar. *Facebook* sendiri memiliki 1,55 milyar pengguna aktif pada 2016, yang setiap penggunanya menghabiskan paling tidak 20 menit per hari untuk membaca informasi terbaru

pada lini masa mereka. Lebih jauh, populasi pengguna ini akan terus meningkat, hingga diprediksi pengguna aktif media sosial di seluruh dunia akan mencapai 2,72 milyar pada 2029, sekitar sepertiga dari populasi dunia (Vasterman, 2018).

Manusia dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi dan diharapkan dapat berkontribusi baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu TIK dapat membawa pengaruh dan kepentingan yang besar dalam perkembangan Negara-negara besar di dunia. Kepentingan tersebut antara lain persaingan politik yang semakin panas diberbagai negara termasuk Indonesia menjadi faktor pendorong para penguasa untuk menggunakan hoaks sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik di mata publik. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita yang menyangkut tokoh publik maupun kebijakan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Contoh, Beredarnya sebuah pesan berantai mengenai vaksin COVID-19, dimana pada narasinya menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 adalah untuk membunuh mayoritas masyarakat Indonesia, dengan tujuan besar penguasaan wilayah NKRI oleh pendatang China dan disebutkan pula bahwa hal tersebut adalah motif kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Faktanya, klaim negatif mengenai vaksinasi COVID-19 adalah alat pembunuh massal adalah hoaks, dan tuduhan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi adalah tuduhan yang tidak benar. Vaksinasi COVID-19 tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan hampir di seluruh dunia (Mth, 2022).

Prevalensi hoaks tidak hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tetapi juga kepentingan ekonomi. Terdapat kecenderungan kepentingan politik dan ekonomi

berjalan beriringan, sehingga cara-cara yang timbul menjadi tidak etis berwujud narasi kebohongan dan prasangka untuk menyerang lawan. Lain halnya dengan *Muslim Syndicate*, pembuat hoaks tidak hanya bermotivasi politik untuk membuat berita bohong saja, tapi juga faktor finansial. Pada awalnya, *New Media* benar-benar digunakan sebagai platform untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, namun peluang finansial yang ditawarkan oleh banyak platform seperti *Facebook* dan *Google AdSense* juga berkontribusi pada komersialisasi hoaks. Bahkan hoaks di sektor perdagangan dapat menghasilkan pendapatan iklan sekitar 600-700 juta rupiah pertahun. Sehingga tidak heran jika peredaran hoaks di Indonesia semakin meningkat. (Budi & Ratmono, 2018).

Di Indonesia, salah satu fenomena menarik mengenai pencegahan hoaks adalah adanya Jabar Saber Hoaks di Provinsi Jawa Barat. Jabar Saber Hoaks merupakan salah satu program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggunakan media digital baru terutama internet. Jabar Saber Hoaks dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang awalnya dibentuk pada tanggal 7 Desember 2018 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 tentang Tim Jabar Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat. Jabar Saber Hoaks memiliki tugas dan fungsi untuk memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas fakta-faktanya yang beredar di tengah masyarakat. Verifikasi informasi dilakukan melalui proses konfirmasi dan kompilasi serta pengolahan data-data dari sumber atau rujukan yang aktual dan kredibel (Diskominfo, 2021).

Jabar Saber Hoaks dibentuk untuk memberikan ruang partisipasi kepada warga agar dapat menyaring informasi yang diterima dan menangkal berita-berita palsu. Program ini adalah hasil inisiasi pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat dan dijadikan program unggulan oleh Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil). Jawa Barat adalah daerah pertama di Indonesia dari 38 provinsi yang memiliki program sapu bersih hoaks. Karena dianggap sebagai kebijakan inovatif, Jabar Saber Hoaks menginspirasi wilayah lain di luar Jawa Barat untuk membentuk unit saber hoaks di wilayah mereka masing-masing. Provinsi DKI Jakarta dengan Jakarta Lawan Hoaks atau Jala Hoaks, dan Kaltim Saber Hoaks yang turut mereplikasi fungsi unit saber hoaks di wilayah mereka. Salah satu kota di Indonesia Timur yaitu Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mereplikasikan unit saber hoaks, Papua pun akan merancang unit saber hoaks juga (Jabar H. , 2022).

Berbeda dengan pelayanan pengaduan pusat seperti program LAPOR! dan program Saber Pungli RI, keduanya dijalankan oleh pemerintah pusat namun dapat diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia sebagai sarana untuk berpartisipasi. Dalam hal ini Jabar Saber Hoaks dirancang dan dijalankan secara mandiri dan independen, bahkan lebih dulu saat pemerintah pusat masih dalam proses pematangan platform serupa. Inisiatif pembentukan platform yang diberlakukan sejak akhir tahun 2018 ini mampu menyerap partisipasi warga dalam verifikasi informasi dan memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan kritis masyarakat dalam menyaring informasi. Hal ini dibuktikan dengan data-data jumlah laporan masyarakat

yang dipublikasikan dalam website dan media sosial Jabar Saber Hoaks. Adapun segmentasi masyarakat yang potensial untuk menjadi pengguna media layanan pengaduan ini yaitu masyarakat yang kritis terhadap informasi, memiliki minat untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah, serta memiliki kapasitas untuk memanfaatkan teknologi digital.

Berdasarkan riset Mafindo, provinsi Jawa Barat menjadi daerah tertinggi di Indonesia terkait dengan persebaran hoaks (Rizaldi, 2019). Oleh karena itu program ini diinisiasi untuk mempercepat respon permasalahan tersebut dengan mewujudkan website dan media sosial sebagai sarana pelayanan sehingga proses verifikasi dan upaya literasi digital masyarakat yang dapat ditempuh dalam waktu singkat. Jika program ini masih berjalan konvensional berdasarkan kehadiran secara fisik, maka proses pelayanan verifikasi informasi akan berjalan lebih lama. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemeriksaan kebenaran informasi dengan Jabar Saber Hoaks dapat disampaikan melalui website <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/>. Media online inilah yang kemudian berperan sebagai sarana layanan penanganan pengaduan berbasis teknologi digital, berdampingan dengan berbagai media lain yang dikembangkan, seperti saluran pengaduan laporan melalui *Facebook official.jabarsaberhoaks*, *Instagram jabarsaberhoaks*, *Twitter @jabarsaberhoaks*, *Line jabarsaberhoaks*, dan *channel Youtube jabarsaberhoaks* yang berisikan berbagai video yang bertujuan untuk memberikan literasi digital masyarakat.

Bentuk-bentuk hoaks yang diterima Jabar Saber Hoaks bisa berupa teks, gambar, video, bahkan audio. Mengingat informasi hoaks terdapat dalam berbagai wujud

seperti; (1) *Fabricated Content* yakni konten baru yang sengaja dibuat dan didesain untuk menipu dan merugikan. (2) *Manipulated Content* yaitu ketika sebuah informasi dimanipulasi untuk merusak atau menipu. (3) *Imposter Content* ketika sumber asli ditiru. (4) *False Content* saat konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. (5) *Misleading Content* yaitu penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. (6) *False Content* ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. (7) *Satire or Parody* yaitu konten yang tidak bertujuan untuk merugikan namun berpotensi mengelabui (JSH, 2020).

Semua laporan yang masuk akan diverifikasi dengan menggunakan media *analytic* dan *hoax analyzer*. Layanan yang tersedia terdapat fitur lacak aduan yang berfungsi untuk mengetahui kepastian laporan. Selain itu, fitur lacak diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebab proses pelayanan dapat dipantau secara transparan. Jabar Saber Hoaks melalui tim pengelolanya berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika mendapati beredarnya berita bohong yang dinilai perlu mendapat penindakan. Kerja sama dengan kepolisian bentuknya koordinasi, jika ada satu akun atau sumber informasi yang sifatnya terus menerus dan meresahkan, akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah juga dilakukan untuk mengklarifikasi isu. Daya kerja program ini dalam lingkup wilayah Jawa Barat. Keberlangsungan program ini khusus untuk berita-berita yang beredar di Jawa Barat, dilakukan oleh orang Jawa Barat, dan dari korban-korbannya juga pihak rakyat dari Jawa Barat (Ramdhani, 2018).

Grafik 1 Jumlah Penduduk Per Provinsi



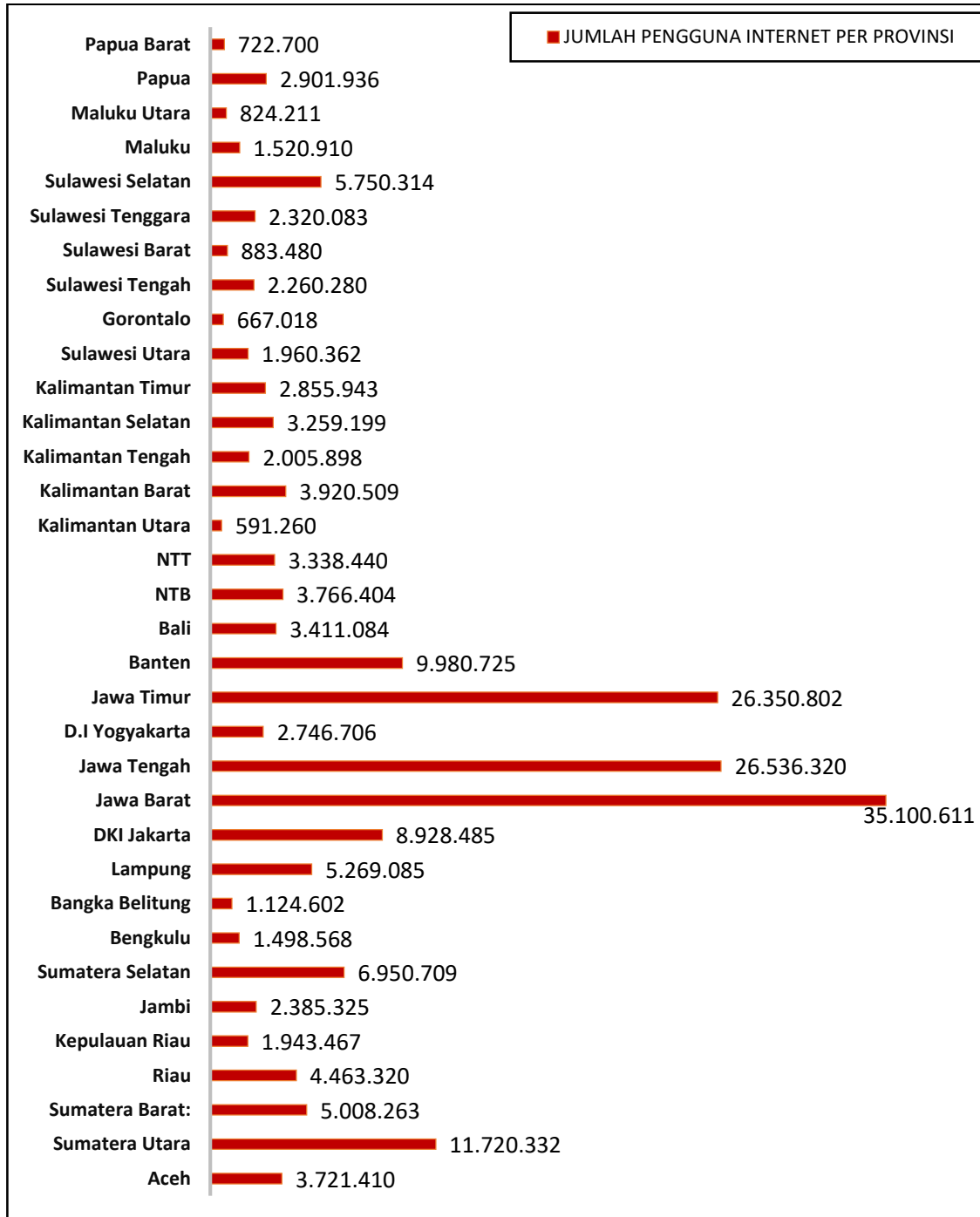
Sumber : Data BPS Tahun 2022

Dari 38 Provinsi di Indonesia, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan hasil rilis data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 49.405.800 jiwa (BPS, 2022). Selain itu, Jawa Barat menyanggah status sebagai daerah dengan pengguna internet

tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia per 9 November 2020, pengguna internet di Jabar mencapai 35,1 juta (Wamad, 2022). Tingginya angka pengguna internet tersebut dikhawatirkan masyarakat akan sulit membedakan berita asli atau berita palsu. Kebijakan ini dibuat agar masyarakat Jawa Barat tahu ke mana harus bertanya. Kekhawatiran pemerintah daerah tersebut didasarkan pada data Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Internet disalahgunakan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat (Yuliani, 2017).

Pada level nasional, selain dikenal sebagai daerah penyangga ibukota, Jawa Barat diduduki oleh perusahaan *Internet Service Provider* (ISP) sebanyak 125 perusahaan. Anggota Pengurus Wilayah APJII Jawa Barat tumbuh 40 perusahaan dari 85 *Internet Service Provider* pada Januari 2019 menjadi 125 pada Mei 2021. Pertambahan jumlah anggota ini seiring dengan peluang bisnis internet di Jawa Barat yang semakin meningkat. Kendati demikian, tidak sedikit juga wilayah di provinsi ini yang masih belum mendapatkan akses atau akses yang terbatas. Problem tersebut diharapkan ada solusi dari pemerintah daerah untuk memberkan akses internet untuk kebutuhan masyarakat dan kondusifitas pelayanan publik. Sehingga masyarakat yang membutuhkan verifikasi informasi tidak harus datang secara fisik di kantor pemerintah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkat dan merata dari seluruh wilayah (APJII, 2021).

Grafik 2 Jumlah Pengguna Internet Per Provinsi Tahun 2020



Sumber : Data APJII Tahun 2020

Jabar Saber Hoaks selaras dengan akselerasi visi Jabar Juara menuju pelayanan masyarakat yang terintegrasi secara digital (Dhiya, 2022). Visi tersebut selain adaptif juga terlaksana sesuai amanat pemerintah pusat yang diatur dalam berbagai regulasi. Antara lain Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, PERPRES No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dll. Sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan inovasi (Achmadi, 2021).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai kondusifitas adalah harga mahal sebagai fondasi dasar untuk membangun Jawa Barat yang juara lahir batin. Praktiknya adalah memerangi informasi meresahkan yang diduga sengaja dibuat untuk merekayasa informasi khalayak umum. Tim pengelola program ini terdiri dari 90 persen adalah anak-anak milenial yang ahli di bidang TIK. (Ramdhani, 2018). Keputusan tersebut didasarkan pada temuan dari Masyarakat Indonesia Anti Hoax, yang menyatakan bahwa generasi millennial adalah yang paling rentan terhadap bahaya hoaks (Yovita, 2017). Generasi Y atau generasi milenial tengah berada di usia produktifnya. Generasi Z juga semakin mengikuti dunia maya karena kondisinya yang mulai memasuki usia produktif. Berdasarkan fakta tersebut, generasi z juga sudah banyak yang menggunakan internet sehingga mereka juga rentan terhadap hoaks dan diharapkan dapat terlibat untuk memaksimalkan tujuan ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring kepada unit pengendali Jabar Saber Hoaks dan selalu memantau grafik laporan sesuai konteks permasalahan. Sepanjang tahun 2022 Jabar Saber Hoaks telah menerima aduan dari masyarakat terkait berita atau isu yang beredar sebanyak 1.171 isu. Aduan tersebut terdiri dari 938 aduan yang merupakan hoaks dan hanya 205 yang merupakan berita atau isu yang benar. Selain itu, terdapat 21 aduan yang tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sementara tujuh aduan masih dalam proses. Setidaknya terdapat lima isu publik yang paling banyak dilaporkan yaitu mengenai masalah kriminalitas, kesehatan, hukum, bencana alam, dan isu tokoh publik (Teguh, 2023).

Kajian studi mengenai hoaks sudah dibahas oleh beberapa *scholar*. Beberapa *scholar* melihatnya dari beberapa prespektif, yaitu; pertama, ulasan tentang sistem deteksi berita bohong yang diimplementasikan di Kota Prague Negara Ceko dalam platform khusus oleh Denis Rehacek (2020). Kedua, tesis Ari Febrian (2019) tentang peran media saber hoaks dalam penguatan kemelekwacanaan generasi muda melalui literasi media digital. Ketiga, tesis Rif'at Fatkhurrohman Jaelani (2020) yang berjudul strategi gerakan dakwah jabar saber hoaks dalam mengurangi berita hoaks di media sosial. Keempat, tesis Fery Adi Pransista yang mengulas tentang pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran hoaks berdasarkan Undang-Undang (2021). Kelima, tesis Didik Yusianto (2022) yang beerjudul peranan kepolisian dalam memberantas berita bohong (hoax) di kepolisian daerah sulawesi selatan. Berdasarkan beberapa kajian tersebut, belum ditemukan kajian yang mengulas terkait partisipasi elektronik dalam pemanfaatan media pencegahan hoaks. Kajian studi ini hendak mengisi kekosongan

pada prespektif tersebut. Studi ini menjadi penting untuk dilakukan untuk memberikan pengetahuan baru tentang potret partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui media elektronik dalam upaya identifikasi hoaks yang belum banyak disorot.

Bagian partisipasi masyarakat penting untuk dikaji lebih jauh. Selain jumlah pengguna internet Jawa Barat terbesar se-Indonesia, menurut data jumlah laporan masuk Jabar Saber Hoaks per bulan tahun 2023, terdapat penurunan angka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi telah yang terlaksana. Apakah benar Jabar Saber Hoaks dalam pelaksanaannya membuat sebuah dampak yang positif yang berpengaruh pada antusiasme partisipasi masyarakat atau sebaliknya, karena dalam pelaksanaannya, banyak pihak menganggap inovatif dan direplika oleh pemerintah daerah lain untuk dijadikan kanal saber hoaks di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil judul *“Partisipasi Publik Secara Elektronik (E-Participation) Pada Media Sosial Jabar Saber Hoaks”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Jabar Saber Hoaks?
2. Bagaimana respon pemerintah dalam mengelola partisipasi masyarakat yang masuk pada Jabar Saber Hoaks?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam pemanfaatan Jabar Saber Hoaks.
2. Menganalisis respon dan peran pemerintah dalam mengelola partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Jabar Saber Hoaks.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan rumpun keilmuan di bidang ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan politik digital dan partisipasi politik digital.
2. Dalam sudut pandang praktis, penelitian ini dapat bermanfaat: (1) Sebagai tambahan bahan referensi dan wacana, khususnya terkait strategi pemerintah daerah di era digital, khususnya pemanfaatan media/teknologi online untuk demokrasi, partisipasi politik dan pelayanan publik. (2) Temuan penelitian ini memberikan gambaran tentang budaya politik kontemporer dan wajah baru program pemerintah yang bermigrasi ke media sosial melalui berbagai perkembangan saluran pemerintah. Studi ini juga memberikan informasi baru tentang inisiatif pemerintah untuk memastikan penyebaran informasi melalui proses verifikasi, pengumpulan dan pengolahan informasi dari sumber atau referensi yang otentik dan terpercaya.

1.5 Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Maraknya berita bohong yang menyebar luas menimbulkan keresahan dikhalayak publik. Sebagian pihak berinisiatif untuk menemukan sebuah alat untuk mendeteksi hoaks. Masalah disinformasi terjadi di banyak negara di dunia tidak terkecuali negara-negara maju yang kaya akan informasi dunia. Denis Rehacek dari Czech Technical University in Prague dalam tesisnya yang berjudul “*Detecting Fake News Using NLP Methods*” mengulas tentang sistem deteksi berita bohong yang diimplementasikan dalam teknologi yang kompleks dan tidak fokus pada teks saja, tetapi juga gambar, video, sumber, dan bahkan bagian komentar di situs web berita. Materi audio dan video dapat ditranskripsi menjadi teks dengan sudah ada perangkat lunak dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hasilnya, *platform* deteksi hoaks yang menggunakan multilingual embedding data-data yang berbeda bahasa dapat diproses melalui satu model. Sistem pendeteksi Berita Palsu yang dibahas d tesis ini dinilai efektif dapat digunakan oleh lembaga negara dan anggotanya untuk mendeteksi konten berbahaya serta di sektor swasta (Rehacek, 2020).

Jabar Saber Hoaks sudah diteliti oleh sebagian orang, namun fokus penelitian yang dilakukan untuk melihat fenomena yang berbeda-beda. Salah satunya Ari Febrian dari Universitas Pendidikan Indonesia dalam tesisnya berjudul “*Peranan Jabar Saber Hoaks Dalam Penguatan Kemelekwacanaan Warganegara Muda Melalui Literasi Media Digital*”. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus tersebut memberikan hasil temuan sebagai berikut :

1)Perencanaan Jabar Saber Hoaks dalam penguatan kemelekwacanaan warga negara muda yakni dimulai dengan menentukan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut kemudian diejawantahkan kedalam bentuk program kerja berupa literasi media digital, baik berupa online maupun offline. 2) Proses literasi media yang dilakukan di Jabar Saber Hoaks yakni melakukan klarifikasi fakta dan melakukan sosialisasi serta pelatihan literasi media digital ke daerah-daerah, seperti Garut, Purwakarta, dan Cianjur. 3) Jabar Saber Hoaks telah berhasil memberikan penguatan bagi kemelekwacanaan warga negara (*civic literacy*) terhadap isu-isu hoaks khususnya mengenai kontens sosial politik dan SARA. 4) Kendala yang ditemui yaitu masyarakat terkadang menganggap Jabar Saber Hoaks tidak independen. Meskipun demikian Jabar Saber Hoaks menegaskan mereka tetap independen dengan memberikan solusi akan kendala tersebut (Febrian, 2019).

Pemberantasan berita bohong dapat dikaitkan dengan strategi dakwah modern, sebab tujuannya untuk menjadikan sesuatu agar lebih baik kedepannya. Rif'at Fatkhurrohman Jaelani dalam tesisnya yang berjudul Strategi Gerakan Dakwah Jabar Saber Hoaks (Studi Kasus Mengenai Program Jabar Saber Hoaks di Jawa Barat), memberikan hasil temuan penelitian sebagai berikut: 1) cara identifikasi hoaks tim Jabar Saber Hoaks melalui klarifikasi fakta (*tabayyun*), edukasi ke setiap daerah dan klasifikasi konten-konten. 2)Program literasi media yang dilakukan tim Jabar Saber Hoaks dengan memanfaatkan kemampuan personal atau individu dan sosial. 3) Strategi mengkampanyekan gerakan dakwah

dengan cara mengadakan workshop, membuat komunitas dan membuat iklan atau pemasaran (Jaelani R. F., 2020).

Fery Adi Pransista dalam tesisnya yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polda Riau Tahun 2019-2020)” mendapatkan temuan penelitian bahwa proses pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan menurut hukum yang berlaku mulai dari tahap penyidikan, penyidikan, perkara. penetapan dan pendelegasian tersangka ke kejaksaan dan kendala yang dihadapi adalah mayoritas terlapor atau tersangka kehilangan barang bukti dan barang bukti, banyaknya pihak yang harus diperiksa dan adanya batasan wilayah hukum (Pransista, 2021).

Kepolisian memiliki andil dalam upaya memberantas berita bohong. Didik Yusianto melakukan riset untuk melihat peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong di wilayah Polda Sulawesi Selatan, dan Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong atau Hoaks di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini, yaitu (1) Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (*Hoax*) di wilayah hukum Polda Sulsel dengan cara memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan pada masyarakat. (2)

Penghambat pemberantasan berita bohong (*Hoax*) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya (Yusianto, Madiong, & Nur, 2022).

Berdasarkan perbandingan dengan studi terdahulu yang tercantum diatas, relevansi penelitian yang dilaksanakan adalah sama-sama menelaah tentang upaya meminimalisir hoaks. Fokus studi dilakukan dalam sorotan yang berbeda dengan lokasi yang beragam. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah dimensi yang diamati. Penelitian ini fokus pada partisipasi publik yang menggunakan teori *e-participation* dalam analisisnya.

1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini mengulas seputar partisipasi elektronik dalam pemanfaatan Jabar Saber Hoaks. Pergeseran demokrasi ke ruang digital dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi saat ini menimbulkan sebuah dampak negatif yang berwujud hoaks, ujaran kebencian, maupun intoleransi. Tidak terkontrolnya perputaran informasi menghilangkan batas antara demokrasi dan kebebasan berpendapat. Studi ini menggunakan landasan teoritis Demokrasi Digital dan *e-Participation*. Dua teori ini digunakan sebagai rujukan untuk menelaah persoalan penelitian agar penulis mendapatkan jawaban yang ilmiah dan relevan.

1.6.1 Demokrasi Digital

Demokrasi digital dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam kondisi ideal, Internet mendorong aspirasi masyarakat tersampaikan melalui berbagai saluran komunikasi pemerintahan sehingga tercipta kebijakan dan regulasi publik. Demokrasi digital juga

membuka ruang digital agar berhasil untuk memahami pluralitas pandangan mengenai sebuah isu, menghadirkan ruang untuk partisipasi publik, bahkan untuk mencapai kesepakatan dalam topik yang relatif kompleks dan kontroversial. Dalam hal ini, masyarakat memiliki kesempatan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara demokratis di ruang digital.

Dalam buku *Social Media and Democracy*, terdapat tiga istilah yang bersinggungan dengan penelitian ini yakni Misinformasi, Disinformasi, dan Ujaran Kebencian. Misinformasi dalam definisi sederhana, berarti salah informasi. Informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan baik alias tak ada tendensi untuk membahayakan orang lain. Sedangkan disinformasi adalah penyebaran informasi yang disengaja. Sosok penyebar informasi tahu kalau informasinya salah. Namun sengaja disebar untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain. Ujaran kebencian (*hate speech*) diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain (Persily & Tucker, 2021).

Keikutsertaan masyarakat ditangkap oleh prinsip pelayanan universal dalam demokrasi digital. Pelayanan universal adalah subjek untuk definisi yang berkembang seiring dengan munculnya teknologi-teknologi komunikasi yang maju. Aspek penting dari keikutsertaan masyarakat adalah bahwa peserta dalam forum publik *online*

diberikan peluang merefleksikan keuntungan pada argumen-argumen kebutuhan mereka dari posisi alternatif daripada hanya merespon pilihan mereka secara tidak reflektif. Dalam konteks ini ketersediaan produk demokrasi digital, pilihan dan kebutuhan individu seharusnya diberikan ruang pertimbangan yang sejajar dengan pembentukan hukum maupun kebijakan yang dibuat. Beberapa pihak berpendapat bahwa media digital merupakan ancaman terhadap demokrasi, namun sebagian orang menganggap bahwa hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik. Pada demokrasi digital, terdapat enam faktor pengaruh penggunaan media terhadap demokrasi kontemporer antara lain :

- a. Partisipasi
- b. Pengetahuan Politik
- c. Kepercayaan
- d. Polarisasi
- e. Populisme
- f. Ruang Gaung

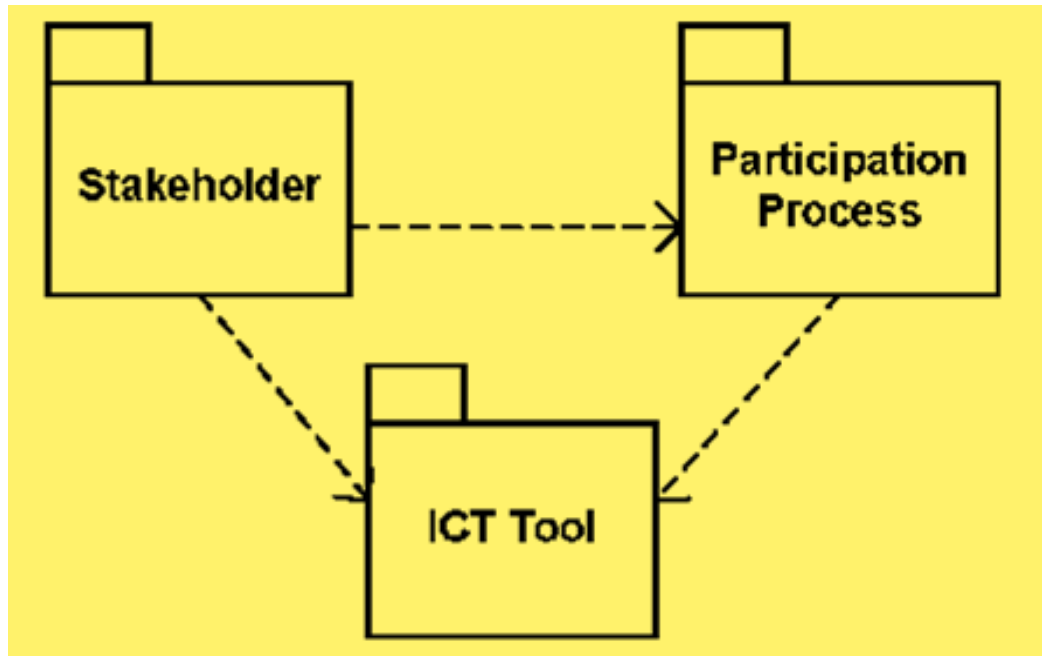
Faktor-faktor diatas diprediksi akan berdampak positif maupun negatif pada keberlangsungan demokrasi. Dalam peneltian ini, faktor-faktor yang dipaparkan dianggap relevan dengan situasi yang ditelaah tentang partisipasi publik elektronik pada media sosial Jabar Saber Hoaks sehingga penggunaan kajian teoritik demokrasi digital diharapkan dapat memperkaya ulasan penelitian. Isu hoaks dan pengetahuan publik seputar literasi digital sangat dekat dengan keberlangsungan Jabar Saber

Hoaks sehingga potret partisipasi masyarakat dan apa saja pengaruhnya dapat dieksplorasi secara lebih luas.

1.6.2 *E-Participation*

E-Participation/ partisipasi elektronik adalah bentuk partisipasi warga negara yang dilaksanakan secara elektronik dalam proses demokratisasi, di mana dukungan teknologi informasi diperlukan sebagai instrumen untuk mendukung warga negara dalam model partisipasi baru. Definisi *e-Participation* yang lebih rinci adalah penggunaan alat elektronik untuk mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dalam tinjauan teoritis menurut Kalampokis, Tambouris dan Tarabanis, keberlanjutan partisipasi elektronik terdapat elemen-elemen yang menggerakkan tata kelolanya. Elemen tersebut dirancang dalam sebuah model domain yang terdiri atas tiga subdomain, yaitu *Stakeholder*, *Participation Process*, dan *e-Participation Tools* sebagai dasar penerapan *e-participation*.

Gambar 1 Elemen e-Participation



Sumber : <https://www.semanticscholar.org/>

Tabel 1 Uraian Elemen e-Participation

E-PARTICIPATION	
Stakeholder	<p>Dimensi yang menjelaskan aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam e-participation serta perannya masing-masing. Stakeholder dalam e-participation secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder pemerintah mencakup lembaga-lembaga pemerintahan, dimana umumnya memiliki peran sebagai inisiator, pengawas, ataupun pengambil keputusan. • Stakeholder publik dapat terdiri atas masyarakat umum, organisasi masyarakat, industri, media, akademisi, dan sebagainya. Publik dalam hal ini berperan sebagai kontributor dalam e-participation.
Participation Process	<p>Dimensi yang mencakup aktifitas partisipasi publik. Dimensi ini menjelaskan berbagai bentuk partisipasi yang dilaksanakan, lingkup partisipasi, metode pelaksanaan, hasil yang diharapkan, tingkatan partisipasi, dan tahapan pembuatan kebijakan. Bentuk partisipasi ini dapat berupa pemungutan suara (voting),</p>

	forum dengar pendapat (publichearing), penandatanganan petisi, diskusi politik, mediasi, dll.
e-Participation Tools	Dimensi yang menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan aspek teknologi (infrastrukturnya). Dalam proses partisipasi, stakeholder menggunakan saluran (e-channel) tertentu, misalnya melalui PC atau perangkat mobile. Melalui e-channel, stakeholder mengakses aplikasi e-participation yang dicakup dalam elemen Tool Category (jenis perangkat). Tool category ini dapat berupa e-polling, e-forum, sistem e-petition, sistem e-voting, ataupun chat room.

Sumber : (Damanik, 2018)

Tolok ukur untuk menakar keberhasilan konsep *e-participation*, *United Nations Department of Economic and Social Affair* (UNDESA) terus melakukan upaya dalam memecahkan faktor-faktor yang menunjang pelaksanaannya. Berdasarkan studi literatur, *e-participation* dapat dinyatakan berhasil jika memenuhi tiga unsur yang termasuk dalam *Measuring and Evaluating e-Participation* (METEP). Ketiga unsur tersebut meliputi :

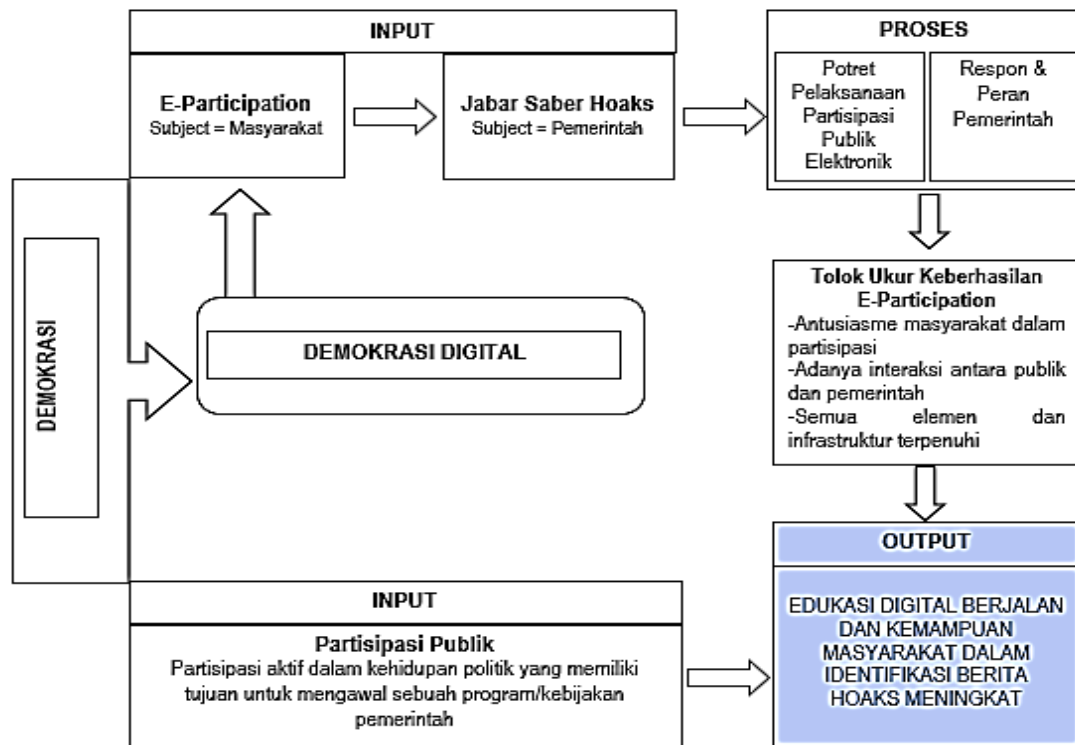
- a. *E-information and Mechanism*, yaitu tahapan yang membuka partisipasi warga dengan cara menyediakan data dan membuka akses informasi kepada publik. Pemberian informasi disertai dengan penjelasan mengenai mekanisme partisipasi.
- b. *E-consultation/E-participation*, yaitu tahap pelibatan warga untuk berkontribusi memberikan pandangan, kritik, saran, dan lain-lain dalam penyusunan kebijakan publik.
- c. *E-decision making*, yaitu merupakan bentuk partisipasi yang lebih dalam dimana warga dilibatkan sebagai mitra dalam merancang dan

merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengembangan produk layanan publik (Mulyani & Retnowati, 2018).

Adapun alasan utama peneliti menggunakan teori tersebut adalah :

1. Teori selaras dengan penelitian yang akan dikaji, partisipasi publik secara elektronik dalam identifikasi hoaks melalui Jabar Saber Hoaks. Dalam hal ini spesifikasi program pemerintah yang akan dieksplorasi berwujud media baru dengan sentuhan teknologi.
2. Teori ini belum terlalu lama sehingga masih relevan untuk digunakan. Demokrasi digital maupun *e-Participation* merupakan konsep baru sekelas dengan *e-Government* yang merupakan program hasil penerapan teknologi pada pemerintahan untuk meningkatkan hubungan dengan warga negara, bisnis, dan badan pemerintah lainnya.
3. Teori ini sudah disertai dimensi dan tahapan implementasi sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis penelitian yang dikaji.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Argumentasi Penelitian

Hadirnya sebuah ruang yang berfungsi untuk identifikasi hoaks perlu diapresiasi. Sebab, dampak buruk yang ditimbulkan akibat hoaks sudah merebak ke berbagai hal. Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk tertinggi yakni sebesar 49.405.800 jiwa dan jumlah pengguna internet sebanyak 35.100.611 tentu angka yang sangat besar aktivitas koneksinya dimedia sosial. Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah benar kebijakan pemerintah dalam program Jabar Saber Hoaks ini dalam pelaksanaannya membuat sebuah dampak positif yang berdampak dengan antusiasme masyarakat dalam melakukan aduan informasi atau sebaliknya.

Data jumlah partisipasi masyarakat dalam Jabar Saber Hoaks mengalami penurunan pada tahun 2023. Rendahnya antusiasme masyarakat disebabkan oleh banyak faktor antara lain keterbatasan administrator dalam memberikan timbal balik partisipasi masyarakat, pelatihan cek fakta mandiri telah dilakukan pada berbagai kesempatan baik secara daring maupun luring, munculnya kanal serupa yang direplika oleh pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan media-media mainstream yang telah memiliki situs cek fakta mengakibatkan penurunan jumlah aduan yang masuk pada Jabar Saber Hoaks. Kendati demikian, inisiatif pemerintah daerah-daerah lain di Indonesia masih banyak yang ingin mereplika Jabar Saber Hoaks karena komitmen penangkalan Hoaks masih kuat sehingga eksistensi Jabar Saber Hoaks masih terjaga. Meskipun partisipan dan aduan naik turun, partisipasi publik masih sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan program ini, karena edukasi digital untuk masyarakat adalah salah satu tujaun program ini.

1.9 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep utama yang digunakan, yaitu :

1. Partisipasi Elektronik

e-Participation atau partisipasi elektronik adalah suatu bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan organisasi lain yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dipandang sebagai media yang efektif untuk menjangkau keterlibatan publik. Dalam ranah politik dan pemerintahan partisipasi elektronik dipandang dapat

memudahkan kerja sama antar pemangku kepentingan, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan mengumpulkan masukan, partisipasi masyarakat menjadikan proses pengelolaan organisasi dan pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif, dan memfasilitasi analisis wawasan dari wacana publik yang sesuai kebutuhan pada platform keterlibatan warga digital.

2. Jabar Saber Hoaks

Jabar Saber Hoaks dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2018 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 tentang Tim Jabar Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat. Jabar Saber Hoaks memiliki tugas dan fungsi untuk pengidentifikasian hoaks atau memverifikasi informasi maupun rumor yang beredar di tengah masyarakat. Verifikasi informasi dilakukan melalui proses konfirmasi dan kompilasi serta pengolahan data-data dari sumber atau rujukan yang aktual dan kredibel.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, mengacu pada John W. Creswell dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design*. Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologi yang berbeda dalam mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambar holistik yang kompleks, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan

informan, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami. Berarti, data hasil dari penelitian kualitatif ini beserta temuan secara langsung amat tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan penulis selaku peneliti ketika menerapkan pendekatan terhadap informan selaku sumber data (Creswell, 2013).

Menurut (Creswell, 2013) deskriptif kualitatif termasuk paradigma penelitian *post-positivistik*. Asumsi dasar yang menjadi inti paradigma penelitian *post positivisme* adalah:

1. Pengetahuan bersifat konjektural dan tidak berlandaskan apa pun. Dalam metode ini tidak akan pernah mendapatkan kebenaran absolut, untuk itu bukti-bukti yang harus dibangun.
2. Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim kemudian menyaring sebagian klaim tersebut menjadi klaim-klaim lain yang kebenarannya jauh lebih kuat.
3. Pengetahuan yang dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan logis. Dalam praktiknya peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen pengukuran tertentu yang diisi oleh partisipan atau dengan melakukan observasi mendalam di lokasi penelitian.
4. Penelitian harus mampu mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar.
5. Pengetahuan dibentuk, aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap objektif.

1.10.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian pada program Jabar Saber Hoaks. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, peneliti mengambil data partisipan masyarakat yang masuk ke dalam sistem tersebut. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, peneliti mengambil data dari pihak pemerintah yakni dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat yang khusus mengelola Jabar Saber Hoaks.

1.10.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) baik dari pihak pemerintah, maupun dari pihak masyarakat sebagai pengguna atau partisipan. Data primer disertai dengan catatan lapangan yang peneliti dapatkan dari observasi baik observasi langsung maupun tidak langsung. Temuan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti kemudian diulas menjadi data.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan yang tertulis seperti

regulasi yang terkait, berkas jumlah laporan Jabar Saber Hoaks yang dikelompokkan per bulan, data kategori hoaks, data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dalam bentuk laporan “Provinsi Jawa Barat Dalam Angka”, bantuan media internet, portal berita *online*, jurnal, *e-book*, website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat, buku panduan Jabar Saber Hoaks serta referensi-referensi lain yang menjadi penguat.

1.10.4 Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, informan ditentukan secara *purposive* yaitu dengan menentukan orang-orang yang memahami persoalan penelitian. Dalam proses penentuan informan dari pihak pemerintah, Diskominfo Jawa Barat merekomendasikan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Jabar Saber Hoaks. Adapun pertimbangan dalam pemilihan informan dari pihak masyarakat antara lain seseorang yang pernah melakukan aduan melalui media sosial Jabar Saber Hoaks. Data-data terkait informan masyarakat direkomendasikan oleh tim Jabar Saber Hoaks pada penelitian lapangan.

Tabel 2 Informan Wawancara

No	Instansi	Informan	Kedudukan
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Alfianto Yustinova, S.E	Ketua Jabar Saber Hoaks
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Tommy Sutami, S.H.	Koordinator Pemeriksa Fakta &

			Pengelolaan Layanan Aduan
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Andrean Mulyadi, S.Kom.	Analisis Data
4.		Diah Ayu Laksmi	Masyarakat/Partisipan Jabar Saber Hoaks
5.		Anindya Erina	Masyarakat/Partisipan Jabar Saber Hoaks
6.		Akmal Putra	Masyarakat/Partisipan Jabar Saber Hoaks
7.		Fajar	Masyarakat/Partisipan Jabar Saber Hoaks
8.		Roni	Masyarakat/Partisipan Jabar Saber Hoaks

1.10.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa alat bantu untuk mendukung tingkat akurasi data dan penyimpanan dokumen yang akan diperoleh peneliti. Alat bantu tersebut berupa laptop dan smartphone.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1) Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur; menurut Sugiyono wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang

sudah ditentukan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi dari kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan penyelenggara (pemerintah) (Sugiyono, 2015).

2) Observasi (Pengamatan)

Pengertian observasi menurut Sugiyono observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang khas jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya. Observasi juga tidak terbatas pada manusia, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dengan adanya tahapan observasi, peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung mengamati pelaksanaan pelayanan aduan pada unit kantor Jabar Saber Hoaks. Sedangkan tidak langsung dengan media pengamatan secara virtual dan percobaan melakukan aduan secara mandiri untuk melihat respon pemerintah yang sesungguhnya (Sugiyono, 2015).

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi sebagai catatan monumental penulis dilampirkan dalam bentuk data wawancara dengan masyarakat dan foto dengan informan dari pihak pemerintah dan pengawas sebagai bukti telah melakukan kegiatan wawancara penelitian tesis (Sugiyono, 2015).

1.10.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara seorang peneliti dalam mengolah data yang terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, analisis data menjadi bagian penting dalam metode ilmiah. Dengan analisis, data dapat lebih tersusun dengan jelas dalam memecahkan masalah. Menurut Milles Mathew dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai berikut :

- 1) Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menyederhanakan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Mathew & Huberman, 2014).
- 2) Penyajian Data merupakan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian penelitian yang penulis wujudkan agar mudah dipahami dalam analisis kualitatif, meliputi: berbagai jenis grafik, tabel, jaringan dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan analisis dan penggambaran secara deskriptif permasalahan yang diteliti (Mathew & Huberman, 2014).

3) Verifikasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan mengkonfirmasi kepada informan terkait temuan data sekunder yang berasal dari media internet maupun studi kepustakaan. Untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan dari analisis studi (Mathew & Huberman, 2014).

1.10.8 Sistematika Tesis

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah mengapa studi ini perlu dikaji, rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian, tujuan penelitian yang berisi apa yang ingin dicapai peneliti, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, kerangka teori, kerangka pemikiran, definisi konseptual dan operasional, metode penelitian beserta tahapan menyeluruh serta sistematika tesis.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum lokasi penelitian, dalam hal ini gambaran umum Provinsi Jawa Barat secara umum disertai dengan potret karakteristik masyarakat dan perkembangan akses digitalnya dan ulasan lengkap terkait Jabar saber Hoaks.

BAB III : PARTISIPASI PUBLIK SECARA ELEKTRONIK PADA MEDIA SOSIAL JABAR SABER HOAKS

Bab ini berisi pembahasan dan analisis data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan. Analisis partisipasi publik elektronik berdasar pada prespektif masyarakat sebagai partisipan. Selain itu, bab ini menjelaskan data jumlah masuk laporan yang masuk dalam sistem, kategori-kategori isu hoaks yang dilaporkan, intensitas masyarakat dalam upaya cek kebenaran informasi, dll. Analisis partisipasi publik elektronik akan dilihat melalui kajian teoritis *e-participation* dan demokrasi digital.

BAB IV : RESPON PEMERINTAH DALAM MENGELOLA PARTISIPASI PUBLIK SECARA ELEKTRONIK PADA MEDIA SOSIAL JABAR SABER HOAKS

Bab ini berisi pembahasan dan analisis data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan terkait realitas respon pemerintah dalam mengelola aspirasi dari warga, prosedur tindak lanjut laporan yang masuk, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam melakukan laporan. Temuan tersebut berdasarkan pada hasil studi wawancara dan observasi selama penelitian berlangsung disertai dengan bukti-bukti pelayanan atas laporan yang disampaikan masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian secara jelas dan ulasan tersebut ditarik kesimpulan yang dijelaskan secara singkat dsertai dengan saran peneliti terhadap penelitian yang akan datang maupun saran untuk keberlangsungan program tersebut.